

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah, serta nikmat sehat, sehingga “Laporan Akhir” penulisan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial yang telah dilakukan oleh tim peneliti di lokasi Kabupaten Berau,, dapat diselesaikan tepat waktu. Pemetaan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan juli dan berakhir pada bulan Desember 2015.

Revisi penyusunan Laporan Akhir ini telah dilaksanakan oleh tim pemetaan berdasarkan saran masukan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama dari unsur praktisi, pemerhati bencana sosial, konflik sosial dari tokoh masyarakat, LSM, Ormas, Pejabat terkait (stakeholder) dan dari unsur akademisi berdasarkan hasil Focus Discussion Group (FGD) yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2015.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi penuh dalam penyelesaian laporan ini, khususnya kepada Bagian Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan kegiatan penelitian. Harapan kami semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang peduli dengan perdamaian, pencegahan secara dini bencana sosial di Kalimantan Timur. Terima kasih.

Samarinda, Desember 2015

Tim Pemetaan

ABSTRAK

Penelitian pemetaan daerah rawan bencana/ konflik sosial di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau pemetaan daerah rawan konflik sosial, menemukan sumber masalah penyebab konflik sosial serta solusi dan rekomendasi pencegahan serta penghentian konflik dari berbagai pendekatan, khususnya dengan metode pendekatan kearifan lokal.

Berdasarkan deskripsi, penyajian data, dan ringkasan hasil penelitian di lokasi penelitian tidak terlalu jauh berbeda, secara berurutan ancaman potensi konflik lebih dominan pada aspek Poleksosbud, Sumber Daya Alam, Batas Wilayah dan aspek sara.

Identifikasi potensi bencana atau konflik sosial di Kabupaten Berau, lebih dominan dari aspek ekonomi, sosial dan budaya, perusahaan besar yang ada di Berau menjadi penopang pendapatan dan menyerap tenaga kerja yang membutuhkan kualifikasi skill tertentu, sementara masyarakat lokal terbatas dalam memenuhi kualifikasi/ kompetensi tersebut sehingga masyarakat lokal termarginalisasi, hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial. Menjamurnya ormas, LSM bersentuhan dengan keetnisan dan kepentingan, hal ini menimbulkan kerentanan terhadap benturan antar ormas. Terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antara warga dengan pihak perusahaan suatu saat akan menjadi bom waktu. Aspek sara adanya persinggungan antar etnis lokal dan etnis berasal dari Etnis tertentu juga perlu mendapat perhatian. Aspek potensi rawan bencana sosial lainnya seperti bencana kebakaran di permukiman warga, banjir dan tanah longsor.

Alternatif solusi dan rekomendasi untuk mencegah dan menghentikan konflik sosial di Kabupaten Berau antara lain perlunya sinergitas peran pemerintah, TNI - POLRI, swasta dan unsur tokoh kunci, advokasi perdamaian, menciptakan dan optimalisasi komunikasi sosial berbasis kearifan lokal, pemetaan Identifikasi ancaman potensi konflik sosial, dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pengrusakan/Korlap/penanggung jawab dalam konflik sosial.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sasaran	5
D. Hasil Yang diharapkan.....	6
E. Istilah dan Pengertian	6
F. Lokasi Kegiatan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Istilah dan Pengertian	7
B. Ketentuan Yuridis	8
C. Teori Konflik	8
D. Pencegahan dan Penanganan Konflik	10
E. Tinjauan Kondisi Sosial dn Budaya	10
F. Pemetaan Kondisi Konflik	11
G. Identifikasi Akar Masalah Konflik	13
H. Definisi Operasional	19
 BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI	
A. Pendekatan dan Pendampingan	25
B. Ruang Lingkup Pekerjaan	26
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Berau	30

BAB V PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**A. Penyajian Data Kabupaten Berau 38****B. Ringkasan Hasil Penelitian 44****BAB VI SOLUSI DAN REKOMENDASI****A. Alternatif Rekomendasi Pencegahan Bencana/****Konflik Sosial 52****B. Rekomendasi Penghentian Bencana/Konflik Sosial 55****DAFTAR PUSTAKA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari gambaran demografi bahwa terdapat 726 suku bangsa dengan 116 bahasa daerah dan terdapat 6 (enam) jenis agama. (*Koran Tempo, 16 Agustus 2012. Pluralisme Sebagai Kekuatan*). Tidak ada satu pun Negara di dunia yang memiliki keberagaman sebesar Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Eka sudah ada sejak kerajaan Majapahit, pada abad ke 13 Bangsa Indonesia sudah beraneka ragam.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan merebaknya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI. Contoh nyata dari konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik yang timbul dalam pergaulan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama seperti munculnya kekerasan, perusakan rumah ibadah dan kekerasan agama lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Konflik bernuansa sentemen agama yang baru saja terjadi pada

saat umat Muslim Tolikara merayakan hari raya Idul Fitri pada tanggal 17 Juli 2015 telah dinodai terjadinya pembakaran mesjid di Tolikara Papua oleh sekelompok oknum yang disinyalir berasal dari kelompok GIDI (Rina Juwita. Opini Publik Kaltim Post, 23 Juli 2015), Peristiwa kekerasan agama ini kembali menimbulkan kecemasan masyarakat Indonesia yang terus menerus mengalami pasang surut intoleransi beragama baik yang dilakukan oleh penganut mayoritas maupun minoritas yang menganggap perbedaan adalah hal yang tidak bisa diterima. Kebrutalan atas nama agama dan keyakinan terdokumentasi dari waktu ke waktu yang berpotensi memecah belah NKRI dan menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua masyarakat Indonesia.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

Konflik horisontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat. Konflik masal tidak akan terjadi

secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik.

Beberapa contoh konkrit masalah konflik yang cukup serius baik yang bersifat vertikal ataupun horisontal yang terjadi pada akhir-akhir ini antara lain: (1) konflik yang bernuansa separatis di NAD, Maluku, dan Papua; (2) Konflik yang bernuansa etnis di Kalbar, Kalteng, dan Ambon; (3) Konflik yang bernuansa ideologis isu faham komunis, faham radikal; (4) Konflik yang bernuansa politis akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengrusakan; (5) Konflik yang bernuansa ekonomi konflik perkebunan di Mesuji; (6) Konflik bernuansa solidaritas liar tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola; (7) Konflik isu agama atau aliran kepercayaan isu berkaitan dengan SARA di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, isu aliran sesat; dan (8) Konflik isu kebijakan pemerintah: BBM, BOS, LPG, dll.

Dari beberapa konflik tersebut di atas, SARA dan Dampak Industri; perkebunan, Ketenagakerjaan, dan ketenagakerjaan merupakan konflik yang sering terjadi dan sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2014. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik. (Jurnal Srigunting, Maret 15: 2013).

Fakta fenomena di atas juga didukung oleh Setara Institute telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebebasan beragama di Indonesia, telah mengungkapkan bahwa telah terjadi sekitar 220 kasus kekerasan beragama pada tahun 2013, pada tahun 2007 terdapat sekitar 91 kasus di seluruh Indonesia, artinya dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus kekerasan bernuansa agama (Kaltim Post, 23 Juli 2015).

Begitu juga dengan potensi bencana sosial di daerah Kaltim cukup tinggi (*Tribun Kaltim: 8 Agustus 2012*), potensi bencana social tersebut antara lain kerusuhan antar warga dan potensi konflik lainnya. Isu suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) menjadi hal yang harus ditangani dan dikelola secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat tidak mudah terhasut dengan berbagai isu yang menyesatkan dan tidak jelas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (provokator).Pengalaman pahit konflik bencana sosial di Kota Tarakan, Nunukan, Kutai Barat tahun 2012, Kota Balikpapan dan lainnya, jangan sampai terulang kembali.

Paparan Kapolri dalam rapat gabungan di Kompleks Gedung Parlemen Jakarta (Senin, 6 Juli 2015), Polri telah memetakan kerawanan provinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang, kita harus waspada meskipun Kalimantan Timur termasuk dalam katagori 2 (dua) daerah rawan konflik pilkada serentak bersama dengan 14 (empat belas) daerah lainnya (*Tribun Kaltim, 8 Juli 2015*). Gejala potensi konflik lainnya saat ini di Kalimantan Timur seperti adanya sentemen antar etnis, masalah pertanahan dan lainnya yang perlu diidentifikasi dalam pelaksanaan pemetaan tahun ini.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa permasalahan bencana sosial, khususnya konflik sosial begitu kompleks dan dinamis, dan terus mengalami perubahan, termasuk di potensi bencana sosial di wilayah Kalimantan Timur, salah satu alternative untuk mencari solusi penanganan konflik adalah perlunya Pemetaan Potensi Bencana Sosial, khususnya di Kabupaten Berau.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemetaan potensi bencana sosial antara lain :

1. Menggambarkan identifikasi faktor-faktor penyebab (akar masalah pemicu terjadinya bencana/ konflik sosial)

2. Menggambarkan identifikasi berbagai alternatif solusi, penanganan bencana/konflik sosial
3. Menggambarkan dan menjelaskan model pemetaan potensi bencana konflik sosial, untuk menyederhanakan pemikiran dan tindakan pencegahan konflik sosial.
4. Menggambarkan proses tahapan-tahapan pekerjaan penanganan konflik di daerah.
5. Memberikan saran, masukkan pencegahan dan penyelesaian konflik kepada pihak terkait lainnya tingkat pusat dan daerah.

C. SASARAN :

Sasaran pemetaan daerah rawan bencana yang menjadi informan, antara lain :

1. Tokoh Masyarakat, meliputi :
 - a. Tokoh Agama
 - b. Tokoh Adat/ Budaya
 - c. Tokoh Pemuda
 - d. Tokoh Wanita
2. Organisasi/ Relawan Pelopor perdamaian, Lembaga Swadaya Masyarakat/ Forum kerukunan/ persatuan/ komunikasian antar umat/ adat/ etnis/ kelompok/golongan.
3. Stake holder dalam penanganan konflik sosial.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pekerjaan pemetaan daerah rawan bencana sosial, antara lain:

1. Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab (akar masalah pemicu terjadinya bencana/ konflik sosial).
2. Teridentifikasi berbagai alternatif solusi, penanganan konflik sosial

3. Produk model pemetaan potensi bencana konflik sosial, untuk menyederhanakan pemikiran dan tindakan pencegahan konflik sosial.
4. Produk Peta potensi konflik di wilayah Kalimantan Timur.
5. Terciptanya komunikasi dan sinergitas yang baik pencegahan dan penyelesaian konflik kepada pihak terkait lainnya tingkat pusat dan daerah.

E. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Pengertian Konflik (secara sosiologis) dapat difahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu (Nader).

Batasan pengertian konflik bencana sosial yang dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah suatu konflik atau kerusuhan sosial dan bencana alam yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti aspek keetnisan, kebudayaan, agama, politik, kebijakan, diskriminasi, geografis dan perpaduan dari aspek tersebut, yang berdampak terhadap banyaknya korban jiwa, harta benda dan mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan di wilayah bencana sosial tersebut.

F. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan pemetaan daerah rawan bencana sosial tahun 2015, yaitu Kabupaten Berau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Menurut Coser (Jurnal Srigunting, 2013), konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan membantu pemantapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi dalam kelompok.

Pengertian konflik secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik sosial sendiri dapat bersumber dari: (1) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; (2) perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antar etnis ; (3) sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; (4) sengketa sumber daya alam antara masyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau (5) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

B. Ketentuan Yuridis

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
3. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial
4. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan
5. Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian
6. Perkap No 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Polri.
7. Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam penanggulangan huru hara.
8. Surat Mendagri No. 300/3305/SJ tentang perhatian khusus terhadap upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat di daerah.

C. Teori Konflik

Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki nilai positif, sejarah jaman maupun kenyataan hingga kini membuktikan bahwa konflik sosial secara langsung selalu menimbulkan akibat negatif. Bentrokan, kekejaman maupun kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa

dengan bangsa, golongan penganut agama yang satu dengan golongan penganut agama yang lain. Kesemuanya itu secara langsung mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam kesumat. Misalnya Konflik Etnis (Kerusuhan Sosial) di Kalimantan Barat.

Fakta menunjukkan bahwa konflik berbasis kekerasan di Indonesia bisa menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari segi isu maupun para pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu yang lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Sementara itu, upaya penanganan konflik (prevention, resolution, and post conflict action) yang dilakukan selama ini pada beberapa daerah konflik seperti: di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara, dan terakhir konflik yang berbasis SARA seperti terjadi terhadap warga SARA di Cikeusik Banten serta konflik berbasis Sumber Daya Alam seperti terjadi di Mesuji yang mengakibatkan korban jiwa masih belum menunjukkan hasil penyelesaian yang optimal, karena Penanganan konflik belum sampai menyentuh pada akar permasalahan konflik.

Secara teoritis terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu kekerasan tersebut. Akan tetapi seringkali kekerasan merupakan muara dari terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Menurut Galtung dalam Sutanto (2005), konflik merupakan penyebab niscaya bagi kekerasan, karena di bawah atau di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Jika konflik dianggap sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, sesungguhnya potensi kekerasan ada di setiap individu. Hal ini karena, konflik sedang dan akan dialami oleh hampir setiap orang. Seperti Kai Fitthjof & Brand Jacobsen (dalam Sutanto, 2005) menyatakan bahwa, konflik berada dalam semua tataran, di dalam diri individu, diantara individu-individu, di dalam dan diantara masyarakat, negeri, dan budaya. Konflik adalah suatu yang alamiah. Ia dialami orang-orang dengan latar belakang, budaya, kelas, kebangsaan, usia, jender apapun, di tengah kehidupan sehari-hari. Kenyataan

menggarisbawahi bahwa konflik sejatinya omnipresent, ada di mana saja. Ia melekat pada tiap aktivitas hidup bermasyarakat dan mustahil dapat dihilangkan.

D. Pencegahan dan Penanganan Konflik

Menurut Suyanto (Jurnal Srigunting, 2013) terdapat dua aspek penting dan krusial yang perlu dikembangkan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik. Pertama adalah, aspek kapasitas untuk menangani konflik yang meliputi keterampilan dan pengetahuan yang adekuat untuk penyelesaian konflik sekaligus pencegahan konflik. Kedua adalah kesadaran kritis masyarakat maupun pemerintah untuk menyelesaikan konflik maupun pencegahan konflik. Ternyata, kedua aspek ini kurang sekali dimiliki oleh lembaga masyarakat sipil maupun pemerintah termasuk Polri. Padahal kedua aspek itu, baik secara teoritik maupun empiris merupakan syarat mutlak untuk penyelesaian dan pencegahan konflik bagi terwujudnya perdamaian

E. Tinjauan Kondisi Sosial dan Budaya

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori atau karakteristik: (1) Individual : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan ;(2) Institusional : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya;(3) Kultural :

merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Multi krisis yang terjadi meliputi krisis ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum, akhirnya mengkristal menjadi suatu krisis kepercayaan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyentuh ke sektor perkebunan. Konflik yang terjadi di perkebunan khususnya adalah berkaitan dengan permasalahan tanah yang mengarah kepada konflik horisontal antara perkebunan dengan masyarakat penggarap dan telah mengakibatkan tindak kekerasan berbentuk pengrusakan lahan (tanah) dan tanaman perkebunan, kemudian bentrok fisik karyawan perkebunan dengan para petani yang menduduki lahan perkebunan, dengan kata lain lingkungan perkebunan telah mengalami kerusakan.

F. Pemetaan Kondisi Konflik

Berikut ini dijelaskan uraian pemetaan kondisi konflik sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan sosial antar kelompok.

Pada sebagian kelompok dari suku – suku yang ada di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat yang mayoritas suku Jawa dan suku Bali yang memiliki budaya kerja yang lebih baik, menjadikan pola kehidupan dan tingkat sosial yang lebih mapan dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berasal dari suku itu sendiri. Kondisi tersebut tanpa disadari dapat memunculkan kesenjangan sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

2. Sikap arogansi dan egosentris kelompok.

Sebagian masyarakat suku masih menganggap bahwa masyarakat suku lain yang berada di adalah masyarakat pendatang, walaupun sudah lebih dari tiga generasi masyarakat tersebut berada di Provinsi . Anggapan tersebut juga menimbulkan sikap arogansi dari masyarakat suku , dimana masyarakat yang dianggap pendatang harus mematuhi semua aturan/konvensi dan budaya yang mereka tetapkan.

3. Lemahnya interaksi sosial.

Proses interaksi sosial antar suku masih sangat minim dilakukan, sehingga apabila timbul permasalahan/gesekan yang melibatkan antar suku justru akan menjadi pemicu terjadinya konflik terbuka.

4. Ketidakseimbangan perhatian pemerintah daerah.

Pembangunan dan perhatian yang lebih banyak ditujukan pada kelompok masyarakat yang dianggap menguntungkan atau mau memberikan dukungan secara politis bagi pemimpin pemerintah daerah yang menjabat saat itu. Selain itu dalam penyelesaian potensi konflik yang ada, perhatian pemerintah daerah seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dari salah satu pihak yang berkonflik.

5. Kurangnya pengaruh tokoh masyarakat

Pada saat terjadi konflik, ketokohan masyarakat tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat guna menghindari timbulnya konflik.

6. Lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Kebebasan di era reformasi dianggap sebagai suatu kebebasan untuk boleh melakukan tindakan apapun. Nilai-nilai Pancasila hanya dianggap sebagai suatu semboyan atau simbol, bahkan lebih ekstrim dianggap sebagai suatu penghambat dalam kebebasan.

7. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan HGU lahan perusahaan.

Permasalahan status Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dampak industri perkebunan. Hal ini disebabkan penerbitan HGU yang menjadi hak pemerintah, dilakukan tidak transparan dan dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Begitu pula pada saat perpanjangan HGU, proses yang dilakukan sarat dengan kepentingan yang menguntungkan beberapa kelompok atau orang. Sementara pihak yang dirugikan terkait ketidakjelasan HGU (masyarakat maupun pihak lain), menggunakan berbagai cara baik secara hukum maupun menggunakan kekuatan massa dalam upaya menyelesaikannya.

8. Kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Masyarakat menganggap bahwa perusahaan industri perkebunan kurang peduli dengan lingkungan sekitar, keberadaan industri perkebunan hanya menguntungkan pihak pengusaha. Di lain pihak, pengusaha dari industri perkebunan merasa sudah memberikan bantuan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap sebagai bentuk kepedulian mereka, walaupun sering pula terjadi bahwa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.

9. Rekrutmen karyawan dan pengelolaan Satpam yang tidak memprioritaskan masyarakat sekitar perusahaan.

Masyarakat sekitar perusahaan menuntut untuk penggunaan semaksimal mungkin tenaga kerja dan karyawan perusahaan yang berasal dari wilayah setempat. Namun demikian pihak perusahaan tidak dapat mengabdikan seluruhnya dengan alasan bahwa sumber daya manusia masyarakat sekitar yang kurang memadai untuk bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Demikian pula dengan satuan pengamanan yang dilaksanakan perusahaan, penggunaan pengamanan yang tidak berasal dari masyarakat sekitar, tidak saja dianggap sebagai ketidakpedulian perusahaan tetapi juga sering menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan petugas pengamanan perusahaan yang berakibat semakin tingginya sikap antipati masyarakat terhadap keberadaan perusahaan di wilayah tersebut.

G. Identifikasi Akar Masalah Konflik

- Sara (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)

A. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

B. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

C. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan.

Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

D. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

- **Industri, Perkebunan, Ketenaga kerjaan dan Economy Gap**

Uraian permasalahan sebagai berikut :

1. Status kepemilikan lahan

- Pengadaan lahan secara paksa
- Konflik batas – batas lahan
- Tumpang tindih kepemilikan lahan

2. Perizinan

- Tumpang tindih perizinan lahan
- Penyalahgunaan pemanfaatan lahan
- Tumpang tindih kewenangan perizinan pemerintah

3.. Masyarakat

- Kemiskinan dan kebodohan
- Mengakibatkan (kecemburuan) tenaga kerja lokal
- Karakter dan budaya masyarakat lokal
- Komunikasi dan sosialisasi antara pengusaha dan masyarakat lokal
- Umur
- PHK sepihak
- Tenaga lokal (diskriminasi)
- Out sourcing
- Keselamatan kerja
- Serikat pekerja

4. Pemerintah

- Kurang berfungsinya aparatur pemerintah
- Kurang perhatian aparatur pemerintah

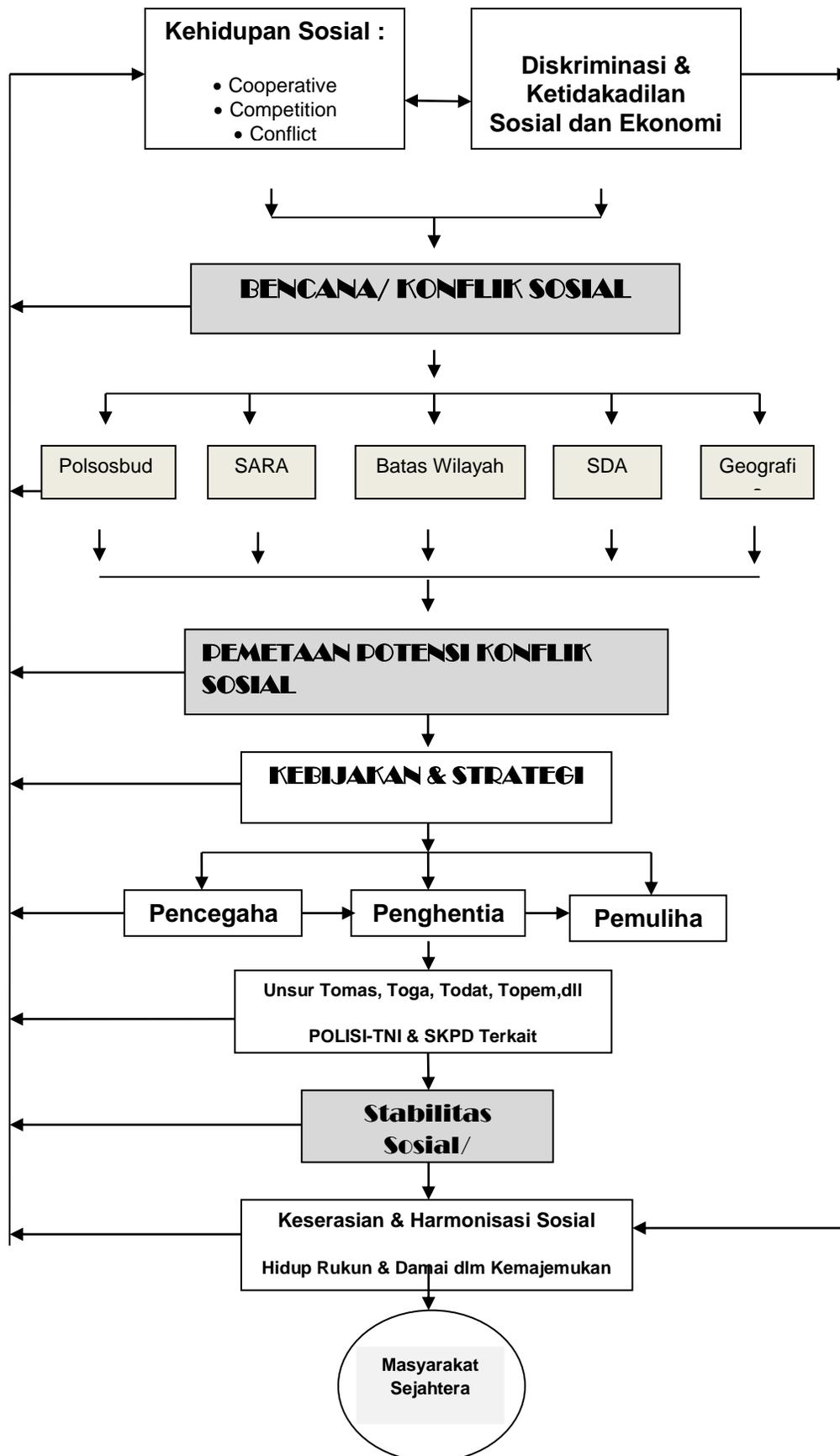
- Kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat lokal

E. Lembaga Swadaya Masyarakat / NGO (National Government Organization)

- Kepentingan praktis LSM/ Ormas
- Kepentingan komoditas LSM/Ormas

(Sumber : Rapim Polri, Jakarta 30 Januari 2013)

Gambar 1. Model Kerangka Berpikir Pemetaan Identifikasi Daerah Rawan
Bencana Sosial



H. DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan dukungan beberapa teori konflik, berikut ini dijelaskan definisi operasional: variabel dan indikator penyebab daerah rawan bencana sosial di Kalimantan Timur, lokasi studi Kabupaten Berau, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah :

Tabel 1. Variabel & Indikator Pemetaan Identifikasi Konflik Sosial

1. Faktor Palsosbud (Politik, Sosial dan Budaya)

Variabel	Indikator	Ket
Palsosbud (Politik, Sosial dan Budaya)	<p>Aspek Politik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerawanan potensi konflik PILKADA : Pilgub, Pilbub/Pilwali di daerah • Adanya indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik, yang melibatkan massa banyak. • Adanya indikasi ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang. • Adanyakesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah, kecamatan, kelurahan. • Adanya Kesenjangan pendidikan masyarakat lokal dan pendatang • Adanya indikasi Kebijakan daerah tdk berpihak pada rakyat, misalnya bidang perkebunan, pertambangan dal lainnya 	

	<p>Aspek Sosial & Kebudayaan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Adanya cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/komunitas/ terhadap adat istiadat, budaya orang lain.• Adanya Internalisasi kesenian dan kebudayaan lain secara paksa atau kedalam masyarakat tertentu.• Adanya pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja.• Adanya pemaksaan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terjadi perubahan drastis sistem pada mata pencaharian pada tatanan ekonomi dan lainnya.• Adanya monopoli dan eksploitasi orang tertentu terhadap sumber hajat hidup masyarakat banyak.• Adanya Omas, OKP atau organisasi lain mempunyai paham radikalisme dan kekerasan.	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya. • Adanya ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu. • Adanya provokasi dan provokator lokal, daerah, pusat hingga internasional. • Adanya tumpang tindih lahan antar warga, maupun dengan pihak perusahaan. • Peredaran minuman keras (Miras) di kalangan generasi muda. 	
--	--	--

2. Faktor Sara (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)

<p>Sara (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)</p>	<p>Aspek Keetnisan/ Suku :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya. • Adanya pelecehan satu etnis ke etnis lainnya. • Adanya hak dan kewajiban lintas etnis yang tidak dipenuhi. Misalnya denda adat belum dipenuhi. • Adanya intervensi pihak 	
---	--	--

	<p>pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat etnis tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi dalam akses peluang kerja bagi etnis tertentu, instansi pemerintah atau swasta. • Ketidakadilan dalam distribusi pemerataan pembangunan wilayah etnis tertentu. <p>Aspek Agama :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya isu pelecehan agama baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan. • Adanya penghinaan keyakinan agama dan suku tertentu. • Adanya eksklusifme internal agama maupun suku. • Adanya aliran sesat/ aliran menyimpang dari agama tertentu. • Adnya pemaksaan ajaran agama tertentu terhadap agama lainnya. • Adanya cara pandang yang berbeda seseorang/ kelompok/komunitas/ negara tertentu terhadap nilai agama. 	
--	--	--

3. Faktor Batas Wilayah

Batas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya batas wilayah yang melanggar daerah lain (mencaplok) daerah lain. • Adanya perbedaan pendapat/ persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah berkaitan batas wilayah. • Adanya indikasi potensi konflik antar warga berkaitan dengan batas wilayah. 	
---------------	--	--

4. Faktor Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi sumber daya alam, atau intervensi kebijakan/ regulasi . • Adanya Kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dengan lahan warga • Adanya ketidakseimbangan penguasaan lapangan pekerjaan pada perusahaan didaerah, seperti perkebunan dan pertambangan 	
------------------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang dilokasi pertambangan atau perkebunan. • .Adanya angkutan perusahaan yang menggunakan lahan warga setempat. 	
--	--	--

5. Faktor Geografis (Potensi Rawan Bencana Alam)

Geografis (potensi rawan bencana alam)	<ul style="list-style-type: none"> • Meletus gunung berapi • Tsunami • Banjir • Tanah Longsor • Kebakaran Hutan • kekeringan • dll 	
---	---	--

BAB III

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Beberapa pendekatan, selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kegiatan pemetaan potensi bencana sosial di Kaltim, Lokasi pemetaan Kabupaten Berau. Beberapa metode pendekatan yang dipakai, antara lain melalui:

A. Pendekatan Pekerjaan

1. Sosialisasi dan Pendampingan

- a. Melakukan rapat-rapat (mulai dan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring) baik dengan dinas/instansi terkait di propinsi/kabupaten/kota maupun dengan stakeholders lainnya, seperti Kesbangpol Prov/ Kab/Kota, Polda Kaltim/Polres, dinas sosial dan instansi terkait lainnya.
- b. Melakukan sosialisasi awal kepada pihak-pihak terkait dan kepada unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lainnya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target survey ke lokasi rawan potensi konflik.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap input, proses dan output dari awal pekerjaan sampai akhir.

2. Kelembagaan/ Institusi masyarakat

- b. Melakukan pendekatan terhadap lembaga masyarakat seperti paguyuban-paguyuban, lembaga adat, lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya.
- c. Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh pada kelembagaan tersebut.
- d. Melakukan pendekatan terhadap lembaga-lembaga indikasi sebagai pemicu konflik di daerah dan pengurus organisasi tersebut.

3. Survei Lapangan dan Instansional

- a. Melakukan survai ke instansi terkait berhubungan dengan data sosial, ekonomi, kependudukan, khususnya kepada BPS di daerah lokasi studi.
- b. Melakukan survai lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan data-data daerah rawan potensi konflik.
- c. Melakukan perhitungan jumlah lembaga/ institusi sosial, paguyuban, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya dan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah bersangkutan.
- d. Penyebaran kuesioner

Untuk menghasilkan data yang diinginkan melalui survey lapangan, dapat pula dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan ke masing-masing pejabat terkait dan unsur tokoh masyarakat, adat, agama, yang memahami substansi permasalahan.

B. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Persiapan dan penjajakan Kerjasama Pemetaan

Laporan Pendahuluan :

- Persiapan pelaksanaan pekerjaan
- Pembentukan Tim Pemetaan
- Tinjauan literatur dan studi dokumentasi
- Metodologi yang digunakan penyusunan pemetaan
- Jadwal kegiatan dan penugasan personil
- Survey Instansional ke instansi terkait untuk mendapat data pendukung.
- Merumuskan instrument untuk persiapan survey ke lokasi kegiatan. Daftar pertanyaan (angket) dan pedoman wawancara (interview)

2. Pemetaan : Focus Group Discussion

- FDG (focus discussion group) tahap I. diskusi tenaga ahli terkait dengan para ahli dibidangnya berkaitan dengan metodologi pelaksanaan pekerjaan dan rancangan instrument untuk mendapatkan data dilokasi pemetaan.

3. Pengumpulan Data Lapangan (Field Research : 5 Kab/Kota)

Kompilasi Data

Setelah survey lapangan dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pekerjaan studio, collecting data dan analisa data, menghasilkan

- Produk laporan adalah: InterimReport (laporan antara), antara lain berisi:
 - ✓ Data primer dan data sekunder serta data pendukung lainnya.
 - ✓ Rancangan teknik analisa data pemetaan.
 - ✓ Kegiatan FDG tahap II, diskusi tenaga ahli dengan para pakar lintas SKPD berkaitan dengan data yang telah diperoleh dan teknik analisa data yang dipergunakan untuk kegiatan pemetaan daerah rawan potensi konflik di Kaltim.

4. Penyusunan dan Review Hasil Pemetaan

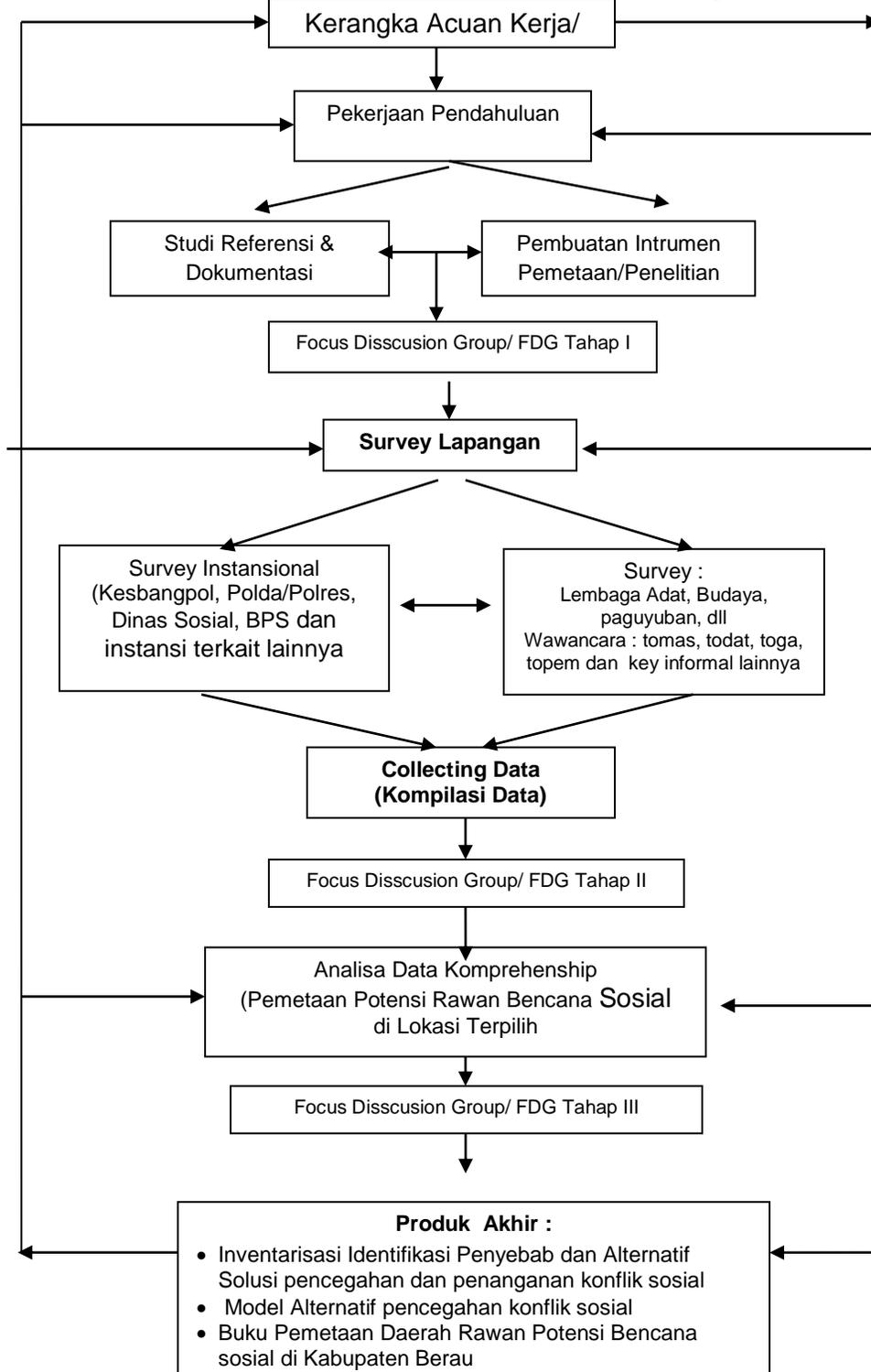
Final Report (Laporan Akhir)

Setelah laporan antara selesai, maka langkah selanjutnya adalah :

- Pertemuan Penyusunan Hasil Pemetaan
- Gambaran hasil analisa dan rekomendasi pemetaan daerah rawan potensi bencana sosial di Kaltim.
- Penggandaan Hasil Pemetaan (Final Report ; Compact Disc dan Buku Hasil Pemetaan.

Gambar 2.

Bagan Alur Kerangka Pendekatan Teknik Pekerjaan
Pemetaan Potensi Rawan Bencana Sosial di Kabupaten Berau



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Berau

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Berau dengan luas wilayah 34.127 km² terletak antara 116 Bujur Timurdan 119 Bujur Timur dan 1 Lintang Utara sampai dengan 2 33' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Berau merupakan kabupaten terluas kelima setelah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dibagi menjadi 13 kecamatan dan 110 desa/kelurahan.

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Kalimantan timur bagian Utara. Daratan Kabupaten Berau terdiri dari gugusan bukit yang sebagian besar tidak berpenghuni, sehingga Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya alam, seperti batu bara dan kayu. Daerah ini juga mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat.

Kabupaten Berau berbatasan langsung dengan kabupaten Bulungan di sebelah utara, Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat dan selat makassar di sebelah Timur.

2. Keadaan Iklim

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Berau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan mei 456,4 mm dan terendah selama tahun 2013 pada bulan maret yaitu 60,7 mm.

Kabupaten Berau mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai bulan April.

Namun dalam tahun-tahun terakhir ini keadaan musim di Kabupaten Berau kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya justru tidak ada hujan.

3. Keadaan Pemerintahan

Kabupaten Berau telah beberapa kali mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 2002, terjadi pemekaran Kecamatan Talisayan menjadi Kecamatan Talisayan itu sendiri, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, dan Kecamatan Batu Putih. Pada tahun 2010 terjadi pemekaran desa. Desa Dumaring di Talisayan dibagi menjadi 2 (dua) desa yaitu Dumaring, dan Capuak. Desa Gunung Sari di Segah dibagi menjadi 3 (tiga) desa yaitu Gunung Sari, Capuak, dan Batu Rajang. Dengan adanya pemekaran tersebut maka saat ini Kabupaten Berau terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan serta 110 Desa/Kelurahan.

4. Jumlah, Pertumbuhan, Persebaran, Kepadatan dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, penduduk Kabupaten Berau mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 117.769 jiwa, meningkat menjadi 179.079 jiwa pada tahun 2010.

Pada periode 2010-2013 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau sebesar 12,56 persen. Kecamatan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Teluk Bayur Sebesar 15,56 persen, sedangkan Kecamatan yang mengalami pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Biduk-Biduk sebesar 1,97 persen.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin tahun 2014

No	Rentang Usia (tahun)	Tahun 2014	
		Laki-laki	Perempuan
1	0-4	12.230	11.679
2	05 s/d 09	11.860	11.272
3	10 s/d 14	9.507	8.918
4	15-19	8.149	7.400
5	20-24	9.458	17.967
6	25-29	11.578	10.237
7	30-34	11.199	9.171
8	35-39	9.916	7.554
9	40-44	8.051	6.038
10	45-49	5.627	4.330
11	50-54	4.070	2.926
12	55-59	2.765	1.883
13	60-64	1.687	1.387
14	65+	2.172	2.019
	JUMLAH		93.323

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk didominasi usia produktif. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di kabupaten Berau hingga tahun 2013, pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 17.470 jiwa. Kelompok ini merupakan usia produktif dan sangat berpengaruh pada ketersediaan angkatan kerja dalam pembangunan.

Pola persebaran penduduk Kabupaten Berau menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah. Wilayah kecamatan dengan luas 86,21 persen dari wilayah Kabupaten Berau dihuni oleh sekitar 31,27 persen dari total penduduk Kabupaten Berau. Sedangkan selebihnya yaitu 68,78 persen menetap di kota yang luasnya hanya 13,79 persen dari luas wilayah Kabupaten Berau. Akibatnya kepadatan penduduk di Kabupaten Berau hanya berkisar 6,05 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung Redeb sebanyak 3.007,53 jiwa/km², Kecamatan Teluk Bayur 135,20 jiwa/km², dan Kecamatan Smbaliung 11,06 jiwa/km².

5. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk digolongkan sebagai angkatan kerja untuk setiap 100 pekerja.

TPAK Kabupaten Berau pada tahun 2013 sebesar 63,81 persen, mengalami penurunan sebesar 0,86 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2012.

Menurut jenis kelamin terlihat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Tahun 2013 TPAK laki-laki perempuan 36,93 persen.

6. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah, tidak hanya dibawahahi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) saja, tetapi ada juga yang dibawahahi oleh Kementerian di luar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah , seperti

Kementerasian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan lain-lain.

Pada tahun 2012/2013 jumlah anak yang bersekolah di SD negeri mengalami peningkatan yaitu dari 25.574 murid menjadi 25.823 murid. Jumlah murid di SD Swasta juga mengalami peningkatan dari 2.147 murid menjadi 2.628 murid. Jumlah guru SD negeri 1.783 orang, dan guru SD swasta berjumlah 194 orang.

Untuk sekolah lanjutan baik lanjutan pertama (SLTP) maupun lanjutan atas (SLTA) mengalami fluktuasi jumlah murid. Tahun 2012/2013 jumlah murid pada tingkat SLTP negeri 8.883 murid, dan Swasta 1.534 murid. Sedangkan untuk SLTA negeri 5.405 murid dan SLTA swasta 2.028 murid. Dari angka tersebut terlihat bahwa pada tingkat SLTP dan SLTA sekolah yang berstatus negeri masih lebih diminati dari sekolah swasta.

Untuk memperkecil disparitas kualitas lulusan sekolah di pedesaan dengan di perkotaan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendidikan terus meningkatkan pengadaan guru di Desa-Desa dengan merekrut para Sarjana baik Sarjana Pendidikan maupun Sarjana non Pendidikan yang berminat menjadi Guru di Pedesaan melalui sistem kontrak dan terus diupayakan peningkatan kualitas Guru di pedesaan melalui pelatihan-pelatihan agar memiliki kompetensi yang lebih baik.

Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas para siswa, siswa dibekali dengan training-training selama 6 bulan, untuk menghadapi uji kompetensi, agar para siswa mendapatkan sertifikasi kompetensi, agar memiliki keterampilan husus sesuai bidang keahliannya, sehingga para lulusan hususnya lulusan SMK dapat mudah terserap dunia kerja.

7. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia, bila pembangunan kesehatan ingin berhasil dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan sektor kesehatan adalah bagian sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia, program kesehatan telah dimulai atau bahkan prioritas utama pada generasi berikutnya terutama ibu hamil, dan anak-anak berusia di bawah lima tahun (BALITA).

Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2012 telah membangun 17 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan 98 unit Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu). Dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 18 unit Puskesmas dan 108 unit Pustu yang tersebar di seluruh wilayah operasional kecamatan termasuk wilayah pedalaman Kabupaten Berau.

8. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan secara merata dapat memajukan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap penurunan angka kriminal.

Angka kriminalitas khususnya tindak kejahatan di daerah Kabupaten Berau dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Tercatat jumlah kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan dari 380 kasus (2012 menurun menjadi 220 kasus (2013).

9. Keagamaan

Kehidupan beragama di Negara Indonesia diatur sesuai pasal 29 UUD 1945 dan butir-butir Pancasila sila pertama, yang menjamin kebebasan penduduk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kehidupan beragama senantiasa dibina dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi dunia dewasa ini, yang mungkin dapat merusak mental bangsa dan menghambat kemajuan, di samping untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama.

Sebagian besar Penduduk Kabupaten Berau beragama Islam (84,61 persen), selebihnya beragama Kristen Protestan (5,38 persen) Katholik (0,32 persen), Budha, (0,90 persen) Hindu (0,003 persen), dan beragama lainnya 0,002 persen. Untuk menunjang kegiatan keagamaan dibangun beberapa sarana ibadah. Tahun 2013 Sarana ibadah tersebut terdiri atas 307 unit Masjid dan Musholla, 139 buah Gereja Protestan, dan Gereja Katholik, dan 1 buah Pura, dan 2 buah Vihara.

Tabel 9.1. Pemeluk Agama Tahun 2013

No	Agama	2013
1	Islam	84,61 %
2	Katolik	0,32 %
3	Hindu	0,003%
4	Budha	0,90 %
5	Konghucu	0
6	Aliran Kepercayaan	0
7	Kristen Protestan	5,38 %
8	Lainnya	0,002%

Sumber: BPS kabupaten Berau dan provinsi Kalimantan Timur (SUSENAS)

Tabel 9.2. Tempat ibadah

No.	Tempat Ibadah	2013
1	Masjid dan Musholla	307
2	Gereja Protestan dan Katholik	139
3	Pura	1
4	Vihara	128
5	Lainnya	2

Sumber: BPS kabupaten Berau dan provinsi Kalimantan Timur (SUSENAS)

Perhatian pemerintah kabupaten dalam pembangunan tempat ibadah dapat terlihat dengan dibangunnya berbagai sarana ibadah yang cukup bagus di kabupaten ini. Tempat-tempat ibadah ini dibangun agar masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Kehidupan beragama senantiasa dibina dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial budaya sebagai dampak dari arus globalisasi dunia dewasa ini, yang mungkin dapat merusak mental bangsa dan menghambat kemajuan, disamping untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama.

BAB V

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi di lokasi kegiatan, wawancara dan jawaban informan terhadap daftar pertanyaan atau angket, berikut ini dikemukakan diuraikan penyajian data dan pembahasan pemetaan daerah rawan bencana sosial di Kabupaten Berau dan kabupaten Mahakam Ulu.

A. Penyajian Data Kabupaten Berau

1. Aspek Sara (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)

Keetnisan/suku

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hakulayat/ adat etnis tertentu, antara lain disebabkan oleh terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah (menggunakan Undang-Undang) dengan masyarakat memakai peraturan hak ulayat.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga yaitu di Era otonomi daerah juga menyebabkan perusahaan dituntut mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak jumlahnya. Tuntutan ini menimbulkan kesulitan bagi perusahaan, tidak hanya karena perusahaan kemudian bekerja tidak efisien, karena kriteria tenaga kerja yang harus diserap sering tidak memenuhi kriteria profesionalitas.
- Perpindahan penduduk dari pulau tetangga yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dapat menyaingi penduduk asli.

Aspek agama

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemeluk agama yaitu terdapat berbagai agama di Berau agama islam yang dipeluk oleh suku Jawa, Bugis, Banjar dan Kutai, dan agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, serta agama lainnya di anut oleh suku Dayak, Batak, Toraja, dan Cina.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya aliran sesat/ aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu, yaitu adanya gejala aliran sesat di Kecamatan Sambaliung. (Sumber : Wawancara dengan warga tidak mencantumkan identitas 29 Juli 2015).

2. Aspek Palsosbud (Politik, Sosial dan Budaya)

Aspek Politik

- Potensi konflik Pilkada/ Pilbup di Kabupaten Berau bisa saja terjadi, menjelang pelaksanaan Pilbup bulan desember 2015, dimana calon Bupati dan wakil bupati sebanyak 2 (dua) pasangan, dimana salah satu pasangan Bupati adalah dulunya sebagai Wakil Bupati, sedangkan calon Wakil Bupati adalah seorang birokrat. Dengan demikian pasangan ini adalah perpaduan antara tokoh parpol dengan birokrat, sedangkan calon yang lainnya adalah seorang anggota DPRD Propinsi yang berpasangan dengan pengusaha.
- Namun demikian mengingat kondisi Berau yang selama ini kondusif diharapkan masyarakat berhati-hati dalam menyikapi setiap adanya isu-isu yang kurang bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan cerdas didalam memilih calon Pemimpinnya.

Aspek sosial dan kebudayaan

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena cara pandang yang berbeda seseorang/Kelompok/ komunitas/ terhadap adat istiadat karena terdapat berbagai macam suku seperti

Dayak, Banjar, Kutai, Jawa, Sulawesi, Toraja, Batak, Flores dan China.

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik ada suku tertentu terbiasa sesuai asal mereka yang tidak cocok dengan kebiasaan dan budaya daerah Kabupaten Berau seperti meminum minuman keras / oplosan, pergaulan yang tidak sopan dan kebiasaan buruk yang lainnya.
- Adanya perusahaan tambang dikhawatirkan dengan peredaran miras dan hiburan malam yang perlu diwaspadai oleh Pemda setempat
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik Adanya peredaran minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat, menjual miras secara diam-diam kepada masyarakat di rumahmakan ,warung-warung pinggir jalan, warung tempat karaoke dan night club.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik cara perusahaan merekrut pegawai yang sesuai standar seperti ijazah, kedisiplinan, ketrampilan dan penampilan sehingga penduduk asli hanya sedikit yang diterima.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik cara kerja, ketrampilan, pendidikan dan berbisnis dimana para pendatang lebih tinggi dibandingkan penduduk asli.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, sebagian masyarakat pendatang sukses dalam bidang ekonomi karena masyarakat pendatang lebih ulet dalam bekerja dan berusaha seperti suku Bugis, Jawa, Batak, Toraja dan China.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya, antara lain disebabkan masyarakat lokal mempunyai tingkatan yang

masih rendah menyangkut skill , pendidikan dan modal untuk berusaha sehingga kalah bersaing dengan warga dari luar, sehingga warga lokal termarginalisasi.

- Pendatang dari luar dengan menggunakan kapal asing (imigran gelap) kebanyakan dari Negara Filipina dan sekitarnya yang menyebabkan imigrasi gelap.

3. Batas wilayah

- Kasus ini terjadi karena adanya masyarakat yang masuk dalam ijin lokasi penambangan. Masyarakat tidak mau diberi ganti rugi karena tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. Sementara Perusahaan menggunakan aturan yang jelas, sehingga ada friksi / perbedaan antara masyarakat dengan perusahaan.
- Menurut masyarakat, perusahaan sering kali melakukan pergantian namadn bendera perusahaan, padahal orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tetap sama. Jumlah kuasa penambangan yang ada di Berausebanyak

95. Konflik lahan tersebut telah memasuki wilayah perkotaan seperti Kecamatan Tanjung Redeb dan Gunung Tabur. Penyelesaian konflik tersebut dilakukan oleh kelompok 9 dengan

Cara masyarakat dikeluarkan dari ijin enclave. Hal tersebut terjadi di Wilayah tengah (Kecamatan Gunung Tabur, Segah, Sambaliung, Teluk Bayur, Kelai dan Kecamatan Tanjung Redeb).

(Sumber : Wawancara dengan Polresta K.M, Perindagkop E.S. Dinas Sosial A.F).

- Hal lain adalah kasus batas wilayah Kabupaten, konflik batas wilayah antara Kecamatan Biatan dengan Kecamatan Sangkulirang, khususnya desa Tepian Terap Kabupaten Kutai Timur sudah terjadi sebanyak 2 kali.
- Dasar Kabupaten Berau menetapkan wilayah Kecamatan Biatan adalah undang-undang tahun 1957 tentang Wilayah Kaltim, sedangkan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangkulirang penetapan batas wilayah berdasarkan hak layat.
- Penyelesaian konflik tersebut pernah dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan dari kedua Kecamatan tersebut, namun belum dapat titik temu. Penyelesaian dilakukan juga oleh Bupati dari kedua Kabupaten tersebut kepada Gubernur Kalimantan Timur, namun sampai saat ini belum ada solusinya. Konflik ini terjadi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Kecamatan lain yang diklaim oleh Kabupaten Kutai Timur adalah Kecamatan Tali Sayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk. (Sumber : Wawancara dengan Dinas Perindag Kop E.S).

4. Aspek Sumber Daya Alam

- Konflik ini terjadi karena adanya kepemilikan ganda pada satu lokasi yang ada. Mereka melakukan pencurian sehingga mengakibatkan kasus pidana yang diselesaikan pihak kepolisian. Lokasi sarang wallet ini juga ada di Masjid Agung Baitul Hikmah yang merupakan Masjid Terbesar dan terindah di Kabupaten Berau. Pada awalnya wallet ini hanya dikelola panitia masjid saja, tetapi saat ini hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid dan kesejahteraan umat.
(Sumber : Wawancara dengan Polresta K.M).
- Kegiatan batubara (Berau Coal) yang terus memperluas areal pertambangan dikhawatirkan akan mengurangi kawasan hijau yang akan berdampak negative.

- Lesunya tambang batubara dikhawatirkan akan menyebabkan banyaknya terjadi PHK

5. Aspek Geografi

- Kemarau panjang menyebabkan kebakaran lahan gambut yang meluas di kelurahan gunung Panjang. Sejumlah titik api di kecamatan Derawan, Kecamatan Segah hingga kecamatan Kelay. Daerah Singkuang, Bangun, Limunjan, Sukan dan Tanjung Batu.
- Kebakaran lahan menyebabkan kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan kesehatan terutama pernapasan dan mata, sehingga menyebabkan liburnya beberapa sekolah di Berau, danantisipasi pembagian masker.
- Bencana kekeringan yang melanda di Labanan dan sekitarnya
- Gelombang besar di Pulau Sangalaki dan sekitarnya yang membahayakan para turis perlu penjaga pantai seperti di Pantai Sanur Bali.
- Ada potensi Angin puting Beliung

BAB V

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi di lokasi kegiatan, wawancara dan jawaban informan terhadap daftar pertanyaan atau angket, berikut ini dikemukakan diuraikan penyajian data dan pembahasan pemetaan daerah rawan bencana sosial di Kabupaten Berau dan kabupaten Mahakam Ulu.

B. Penyajian Data Kabupaten Berau

3. Aspek Sara (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)

Keetnisan/suku

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hakulayat/ adat etnis tertentu, antara lain disebabkan oleh terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah (menggunakan Undang-Undang) dengan masyarakat memakai peraturan hak ulayat.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga yaitu di Era otonomi daerah juga menyebabkan perusahaan dituntut mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak jumlahnya. Tuntutan ini menimbulkan kesulitan bagi perusahaan, tidak hanya karena perusahaan kemudian bekerja tidak efisien, karena kriteria tenaga kerja yang harus diserap sering tidak memenuhi kriteria profesionalitas.
- Perpindahan penduduk dari pulau tetangga yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dapat menyaingi penduduk asli.

Aspek agama

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemeluk agama yaitu terdapat berbagai agama di Berau agama islam yang dipeluk oleh suku Jawa, Bugis, Banjar dan Kutai, dan agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, serta agama lainnya di anut oleh suku Dayak, Batak, Toraja, dan Cina.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya aliran sesat/ aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu, yaitu adanya gejala aliran sesat di Kecamatan Sambaliung. (Sumber : Wawancara dengan warga tidak mencantumkan identitas 29 Juli 2015).

4. Aspek Palsosbud (Politik, Sosial dan Budaya)

Aspek Politik

- Potensi konflik Pilkada/ Pilbup di Kabupaten Berau bisa saja terjadi, menjelang pelaksanaan Pilbup bulan desember 2015, dimana calon Bupati dan wakil bupati sebanyak 2 (dua) pasangan, dimana salah satu pasangan Bupati adalah dulunya sebagai Wakil Bupati, sedangkan calon Wakil Bupati adalah seorang birokrat. Dengan demikian pasangan ini adalah perpaduan antara tokoh parpol dengan birokrat, sedangkan calon yang lainnya adalah seorang anggota DPRD Propinsi yang berpasangan dengan pengusaha.
- Namun demikian mengingat kondisi Berau yang selama ini kondusif diharapkan masyarakat berhati-hati dalam menyikapi setiap adanya isu-isu yang kurang bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan cerdas didalam memilih calon Pemimpinnya.

Aspek sosial dan kebudayaan

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena cara pandang yang berbeda seseorang/Kelompok/ komunitas/ terhadap adat istiadat karena terdapat berbagai macam suku seperti Dayak, Banjar, Kutai, Jawa, Sulawesi, Toraja, Batak, Flores dan China.

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik ada suku tertentu terbiasa sesuai asal mereka yang tidak cocok dengan kebiasaan dan budaya daerah Kabupaten Berau seperti meminum minuman keras / oplosan, pergaulan yang tidak sopan dan kebiasaan buruk yang lainnya.
- Adanya perusahaan tambang dikhawatirkan dengan peredaran miras dan hiburan malam yang perlu diwaspadai oleh Pemda setempat
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik Adanya peredaran minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat, menjual miras secara diam-diam kepada masyarakat di rumah-rumah, warung-warung pinggir jalan, warung tempat karaoke dan night club.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik cara perusahaan merekrut pegawai yang sesuai standar seperti ijazah, kedisiplinan, ketrampilan dan penampilan sehingga penduduk asli hanya sedikit yang diterima.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik cara kerja, ketrampilan, pendidikan dan berbisnis dimana para pendatang lebih tinggi dibandingkan penduduk asli.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, sebagian masyarakat pendatang sukses dalam bidang ekonomi karena masyarakat pendatang lebih ulet dalam bekerja dan berusaha seperti suku Bugis, Jawa, Batak, Toraja dan China.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya, antara lain disebabkan masyarakat lokal mempunyai tingkatan yang masih rendah menyangkut skill, pendidikan dan modal untuk berusaha sehingga kalah bersaing dengan warga dari luar, sehingga warga lokal termarginalisasi.

- Pendatang dari luar dengan menggunakan kapal asing (imigran gelap) kebanyakan dari Negara Filipina dan sekitarnya yang menyebabkan imigrasi gelap.

3. Batas wilayah

- Polresta K.M, Perindagkop E.S. Dinas Sosial A.F). Kasus ini terjadi karena adanya masyarakat yang masuk dalam izin lokasi penambangan. Masyarakat tidak mau diberiganti rugi karena tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. Sementara Perusahaan menggunakan aturan yang jelas, sehingga ada friksi / perbedaan antara masyarakat dengan perusahaan.
- Menurut masyarakat, perusahaan sering kali melakukan pergantian nama dan bendera perusahaan, padahal orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tetap sama. Jumlah kuasa penambangan yang ada di Berau sebanyak 95. Konflik lah tersebut telah memasuki wilayah perkotaan seperti Kecamatan Tanjung Redeb dan Gunung Tabur. Penyelesaian konflik tersebut dilakukan oleh kelompok 9 dengan cara masyarakat dikeluarkan dari ijin enclave. Hal tersebut terjadi di Wilayah tengah (Kecamatan Gunung Tabur, Segah, Sambaliung, Teluk Bayur, Kelai dan Kecamatan Tanjung Redeb). (Sumber : Wawancara dengan
- Hal lain adalah kasus batas wilayah Kabupaten, konflik batas wilayah antara Kecamatan Biatan dengan Kecamatan Sangkulirang, khususnya desa Tepian Terap Kabupaten Kutai Timur sudah terjadi sebanyak 2 kali.
- Dasar Kabupaten Berau menetapkan wilayah Kecamatan Biatan adalah undang-undang tahun 1957 tentang Wilayah Kaltim, sedangkan Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangkulirang penetapan batas wilayah berdasarkan hak ulayat.

- Penyelesaian konflik tersebut pernah dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan dari kedua Kecamatan tersebut, namun belum ada titik temu. Penyelesaian dilakukan juga oleh Bupati dari kedua Kabupaten tersebut ke pada Gubernur Kalimantan Timur, namun sampai saat ini belum ada solusinya. Konflik ini terjadi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Kecamatan lain yang diklaim oleh Kabupaten Kutai Timur adalah Kecamatan Tali Sayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk. (Sumber : Wawancara dengan Dinas Perindag Kop E.S).

6. Aspek Sumber Daya Alam

- Konflik ini terjadi karena adanya kepemilikan ganda pada satu lokasi yang ada. Mereka melakukan pencurian sehingga mengakibatkan kasuspida yang diselesaikan pihak kepolisian. Lokasi sarang wallet ini juga ada di Masjid Agung Baitul Hikmah yang merupakan Masjid Terbesar dan terindah di Kabupaten Berau. Pada awalnya wallet ini hanya dikelola panitia masjid saja, tetapi saat ini hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid dan kesejahteraan umat.
(Sumber : Wawancara dengan Polresta K.M).
- Kegiatan batubara (Berau Coal) yang terus memperluas areal pertambangan dikhawatirkan akan mengurangi kawasan hijau yang akan berdampak negative.
- Lesunya tambang batubara dikhawatirkan akan menyebabkan banyaknya terjadi PHK

7. Aspek Geografi

- Kemarau panjang menyebabkan kebakaran lahan gambut yang meluas di kelurahan gunung Panjang. Sejumlah titik api di kecamatan Derawan,

Kecamatan Segah hingga kecamatan Kelay. Daerah Singkuang, Bangun, Limunjan, Sukan dan Tanjung Batu.

- Kebakaran lahan menyebabkan kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan kesehatan terutama pernapasan dan mata, sehingga menyebabkan liburinya beberapa sekolah di Berau, dan antisipasi pembagian masker.
- Bencana kekeringan yang melanda di Labanan dan sekitarnya
- Gelombang besar di Pulau Sangalaki dan sekitarnya yang membahayakan para turis perlu penjaga pantai seperti di Pantai Sanur Bali.
- Ada potensi Angin puting Beliung

∥

C. Ringkasan Hasil Penelitian

Gambaran Umum Pemetaan Potensi Rawan Bencana Sosial di Kabupaten Berau

NO	Variabel (Topik/Aspek)	Indikator (Faktor Penyebab Bencana Sosial)	Jawaban		Lokasi Kota, Kecamatan, Kel/ Desa	
			Ya	Tidak		
1.	Sara (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)	Aspek Keetnisan/ Suku :		V		
		1) Apakah terdapat etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya.		V		
		2) Apakah ada pelecehan satu etnis ke etnis lainnya.		v		
		3) Apakah ada pelanggaran hak dan kewajiban lintas etnis yang tidak dipenuhi. Misalnya denda adat belum dipenuhi.		V		
		4) Apakah ada intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat/ adat etnis tertentu.		V		
		Aspek Agama :		V		
		5) Apakah ada pelecehan agama baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan		V		
		6) Apakah ada konflik bagi masyarakat yang menjalankan perayaan keagamaan?		V		
		7) Apakah ada penghinaan keyakinan agama dari suku tertentu.		V		
		8) Apakah ada yang merasa eksklusif internal agama maupun suku.		v		
		9) Apakah ada aliran sesat/ aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu.		v	Sambaliung	Islan
		10) Apakah ada pemaksaan ajaran agama tertentu terhadap agama lainnya.		V		
		11) Apakah ada cara pandang yang berbeda seseorang/ kelompok/ komunitas/ negara tertentu terhadap nilai agama		V		
2	Polsosbud (Politik, Sosial dan Budaya)	Aspek Politik :		v		
		1) Apakah ada gejala konflik baik vertical maupun horizontal yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yad sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi?		V		
		2) Apakah politik uang (money political) akan menimbulkan konflik antara kontestan dalam pemilihan kepala daerah serentak yad?		V		

		3) Apakah ada indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik, yang melibatkan massa banyak.		V		
		4) Apakah terdapat kesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah, kecamatan, kelurahan.		V		
		5) Apakah ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. (misalnya: kebijakan tumpah tindih lahan, hak tanah ulayat, dll)		V		
		Aspek Sosial & Kebudayaan : 6) Apakah terdapat cara pandang yang berbeda seseorang/ kelompok/ komunitas/ terhadap adat istiadat, budaya orang lain.	V			Ini ad saja, salin adat
		7) Apakah ada pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja.		v		
		8) Apakah terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang.		V		
		9) Apakah ada kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang.		V		
		10) Apakah telah terjadi penggunaan IPTEK, sehingga terjadi perubahan drastis sistem pada mata pencaharian pada tatanan ekonomi dan lainnya.	V			Di se Perta
		11) Apakah terdapat monopoli dan eksploitasi orang tertentu terhadap sumber hajat hidup masyarakat banyak.		V		
		12) Apakah ada Omas, OKP atau organisasi lain mempunyai paham radikal dan kekerasan.		V		
		13) Apakah ada masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya.		V		
		14) Apakah ada tenaga kerja asing di daerah ini?	V			Di P Philip
		15) Apakah terdapat ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu.		V		
		16) Apakah terdapat provokasi dan provokator lokal, daerah, pusat hingga internasional.		V		
		17) Apakah ada tumpang tindih lahan antar				Tela

		warga, antar warga dengan pihak perusahaan, antar perusahaan.	V			Ters mas
		18) Apakah terdapat peredaran minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat.	V			Deng
3.	Batas Wilayah	1) Apakah ada batas wilayah yang melanggar daerah lain (mencaplok) daerah lain.	V			Anta Kabu deng Keca Bidu ke d Kalti
		2) Apakah ada perbedaan pendapat/ persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah berkaitan batas wilayah.		V		
		3) Apakah ada indikasi potensi konflik antar warga berkaitan dengan batas wilayah.		V		
4.	Sumber Daya Alam	1) Apakah pernah ada konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi sumber daya alam, atau intervensi kebijakan/ regulasi		V		
		2) Apakah ada kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dengan lahan warga	V			Dise
		3) Apakah terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang dalam penguasaan sumber daya alam.		V		
		4) Apakah ada angkutan perusahaan yang menggunakan lahan warga setempat.		V		
6.	Geografis (potensi rawan bencana alam)	1) Apakah ada meletus gunung berapi		V		
		2) Apakah ada Tsunami		V		
		3) Apakah ada Banjir	V			Banj
		4) Apakah ada Tanah Longsor		V		
		5) Apakah ada Kebakaran Hutan	V			Nan
		6) Apakah ada Kekeringan	V			Jika diata
		7) Apakah ada Angin Topan		V		

No.	Aspek Konflik	Permasalahan	Pot
1.	Polsosbud (Politik, Sosial dan Buda ya)	Terdapat adanya potensi konflik akibat Pilkada/ Pilbup di Berau yang akan datang, hal ini disebabkan antara lain terjadinya perbedaan persepsi dan kepentingan team sukses calon tertentu, perbedaan partai, kepentingan pemain lama untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, tidak siap kalah oleh calon tertentu, tidak puas dengan hasil perhitungan suara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa melibabkan tidak siap kalah dalam Pilkada ▪ Penolakan atau serangan hitam dengan fitnah yang baik langsung maupun tidak ▪ Penolakan oleh team sukses atau perhitungan suara jika terdapat indikasi kecurangan ▪ Tuntutan ke jalur hukum atau mahkamah konstitusi
2..		Terdapat adanya indikasi persaingan perebutan kekuasaan antar elit politik, yang melibatkan massa, Persaingan elit politik sesama etnis lokal untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Baik pejabat birokrasi maupun pimpinan partai politik di kabupaten Berau, mengingat Bupati saat ini sudah dua periode menduduki jabatan sebagai wakil bupati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk massa pendukung elit tertentu dan kelompok lainnya, etnis maupun berbeda ▪ Pendukung elit tertentu etnis atau primordialisme tertentu. ▪ Telah ada nama muncul Ahmad Rifai berpasangan dengan Agustinus Muharram dengan Agustinus Muharram
5.		Terdapat cara pandang yang berbeda seseorang/ kelompok/ komunitas/ terhadap adat istiadat, budaya orang lain karena di Berau terdapat banyak suku seperti, Berau, Dayak, Bugis, Jawa, Toraja, Flores, Makassar dan Batak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalau pemerintah tidak memperhatikan kerukunan antar etnis
6.		Terdapat adanya perubahan budaya, adat atau kebiasaan warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja etnis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya perubahan nilai, adat istiadat, kebiasaan

		lainnya. Pertentangan nilai-nilai tradisional/ kearifan lokal dengan nilai-nilai modern (westernisasi), Hal ini terjadi di kampung atau kecamatan dimana ada perusahaan tambang/ perkebunan.	dengan pihak perusahaan agama. <ul style="list-style-type: none"> Terjadinya konflik nilai-nilai dengan nilai-nilai khusus yang generasi itu
7.		Terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang. seperti di areal perkebunan, tambang batubara dan birokrasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakberdayaan, ketahanan dan tekanan oleh pemerintah/perusahaan pada pen
8.		Terdapat kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang, hal ini terlihat pada perusahaan pertambangan, pekerja pendatang lebih unggul dalam aspek pendidikan dan jabatan, sedangkan masyarakat lokal kebanyakan unskill labour .	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan keadilan jabatan lokal melibatkan warga
9.		Terdapat adanya Ormas, OKP etnis tertentu mengarah ke paham keras. Beratribut militerisme dan mempertahankan adat lokal, seperti lasykar, komando dan gerakan.	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya Ormas, untuk penyeimbangan antara pemerintah atau warga. Ormas, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau
10.		Adanya ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu, khususnya masyarakat lokal terhadap orang Bugis, Batak, Toraja, China dan Jawa di perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit memiliki kebun sawit yang luas. Sebaliknya adanya diskriminasi penerimaan PNS dan penempatan jabatan penting di Pemkab Kutai Timur antara orang lokal lebih mayoritas dibanding pendatang.	<ul style="list-style-type: none"> Ada ketersinggungan masyarakat pendatang yang berkegiatan di perusahaan baik tambang
13		Terdapat peredaran minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat, khususnya di tempat hiburan malam dan lokalisasi. Penjualan miras dilakukan secara diam-diam di warung-warung pinggir jalan, kios dan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Beredarnya minuman keras yang merusak kesehatan masyarakat khususnya di kalangan masyarakat yang terkadang memba

14.	Sara (Suku, Agama, Ras&antarGolo ngan)		
15.	Batas Wilayah	Adanyabataswilayah yang melanggardaerah lain.	<p>Kasusini terjadikarenaad masukdalamijinlokasipe Masyarakattidakmaudil denganharga yang Perusahaan menggu sehinggaadafriksi perbedaanantaramasya</p> <p>Konfliklahantersebutte nsepertiKecamatanTan enyelesaianKonflikterse dengancaramasyarakat Hal tersebut terj (KecamatanGunungTab TelukBayur, Kelai dan K</p> <p>Hal kasusbataswilayahKabu araKecamatanBiatande khususnyadesaTepianT ahterjadisebanyak 2 ka</p> <p>DasarKabupatenBeraur nBiatanadalahundang-u Wilayah sedangkanKabupatenKu</p>

			<p>angpenetapanbataswila</p> <p>Penyelesaiandilakukan, patentersebutkepadaG namunsampaisaatinibe Konflikinterjadisejaktal Kecamatanlain klaimolehKabupatenKu Sayan, BatuPutihdan Bi</p>
16.	SumberDayaAl am	Ada perbedaan persepsi antara perusahaan dengan warga, berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Berau.	<p>■Tuntutanwargaterhada onpensasiataulainnya.</p> <p>■Kemungkinan terdapat antara pemerintah peru adanya lubang bekas ta sesuai kepatutan</p>
17.	Geografis (potensirawan Bencanaalam)	PenyebabBanjir di KabupatenKutaiTimurjikapembukaan lahan untuk tambang batubara dan kelapa sawit tidak terkendali..	<p>■Konflik akan terjadi antara pemerintah karena lahan pertanian , hutan</p>
		Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu PotensiBencanaKebakaranperkebunan	Konflik akan terpicu antara dan perkebunan milik p

BAB VI

SOLUSI DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian penyajian data, pembahasan dan ringkasan hasil penelitian berkaitan dengan ancaman potensi konflik sosial, serta memperhatikan dan merespon saran/masukan yang konstruktif dari peserta Focus Discussion Group (FGD) yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali, khususnya identifikasi potensi daerah rawan bencana sosial di Kabupaten Berau, berikut ini di gambarkan solusi dan rekomendasi pencegahan, penanganan dan penghentian bencana sosial tersebut sebagai berikut :

A. Alternatif Rekomendasi Pencegahan Bencana/Konflik Sosial

a. Sinergitas peran Pemerintah, TNI-POLRI, Swasta dan Unsur Tokoh Masyarakat :

- Pembentukan Tim Mediasi atau sejenis satgas berasal dari unsur Kepolisian, TNI, Tokoh berpengaruh, Pengusaha dan SKPD terkait yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan, sengketa pertambangan, perkebunan, baik permasalahan lahan, ketenagakerjaan maupun dampak negative lain dari industri perkebunan atau pertambangan.
- Mengoptimalkan peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang diketuai oleh Bupati/ Walikota untuk mengadakan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi teknis guna menemukan substansi/akar setiap permasalahan serta mendeteksi sedini mungkin situasi dan kondisi daerah dan segala aktifitas sosial kemasyarakatan yang berkembang, khususnya mengidentifikasi orang/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang berpotensi sebagai pemicu atau pelaku kekerasan.
- Bekerjasama dengan provider komunikasi guna meredam isue SARA yang dihembuskan oleh provokator lokal maupun luar daerah.

- Mendorong adanya program CSR(*corporate social responsibility*) dari perusahaan pertambangan dan perkebunan, melaksanakan program kegiatan pencegahan konflik, program keserasional dan harmonisasi sosial, sebagai investasi sosial.

b. Advokasi Perdamaian Aspek Hukum :

- Advokasi biasanya dilakukan kepada Pemda, Kepolisian, DPRD dan lembaga negara lainnya. Advokasi memerlukan kepercayaan, otoritas, legitimasi, dan kemauan untuk mengintervensi kebijakan negara. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengubah kebijakan agar negara atau Peraturan Daerah semakin peduli terhadap eksistensi perdamaian, terutama bagaimana negara tidak membuat kebijakan yang menyulut konflik atau tidak melindungi korban konflik.
- Mengoptimalkan peran DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota untuk menerbitkan PERDA HUKUM ADAT, mengingat salah satu faktor pemicu konflik sosial adalah pemberlakuan hukum adat etnik tertentu kepada etnis lainnya bertentangan dengan hukum NKRI.
- Review regulasi kewenangan Bupati (SKPD terkait perizinan tambang dan perkebunan) serta kewenangan camat atau kades dalam menerbitkan surat keterangan tanah berikut tata administrasi pencatatannya.
- Pengawasan intensif dan sanksi hukum yang tegas kepada mafia tanah dan mafia perizinan jika terbukti melanggar hukum yang berlaku.
- Pengawasan dan pembinaan wawasan kebangsaan kepada Ormas, OKP beratribut militerisme atau organisasi lainnya yang mengarah kepada radikalisme.

c. Menciptakan dan Optimalisasi Komunikasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Lokal Wisdom)

- Optimalisasi peran dan fungsi (pemberdayaan) Forum Perdamaian sampai ke desa atau kampung, seperti:
 - ✓ FKPMKT (Forum Komunikasi Antar Komponen Masyarakat)
 - ✓ FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) dalam rangka membangun sinergitas kerukunan antar umat beragama.
 - ✓ FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
 - ✓ FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)
 - ✓ Forum-Forum RT (Rukun Tetangga)
 - ✓ dan forum perdamaian lainnya, yang ada didaerah bersangkutan.
- Mengembangkan solusi penyelesaian/ sengketa dengan dialog (musyawarah) salah satu cara untuk saling memahami, mencari titik temu, dan menyelesaikan permasalahan. Dimensi dasar dari kualitas partisipasi adalah kontinuitas “DIALOG” atau NEGOSIASI sampai terjadinya kesepakatan atas penyelesaian kasus konflik tertentu.

d. Pemetaan Identifikasi Ancaman Potensi Konflik Sosial

- Pembuatan peta rawan bencana dan konflik sosial Kabupaten / Kota sampai pada tingkat Kecamatan, Kelurahan / Desa untuk dapat memonitor setiap saat perkembangan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
- Melakukan pemetaan (mapping) nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom) masing-masing etnis/ suku untuk mediasi atau resolusi konflik sosial.

B. Rekomendasi Penghentian Bencana/Konflik Sosial

1. Melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pengrusakan/Korlap/penanggung jawab dalam konflik sosial.
2. Melokalisir kejadian agar tidak berkembang dengan cara mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat camat, kades, dan informal leader lainnya.
3. Mengamankan penganut aliran SARA yang menjadi sumber konflik dan sasaran kekerasan fisik dalam konflik sosial.
4. Melaksanakan penjagaan di lokasi kejadian dan patroli zona terpadu Polres, Polsek dan Polda di bantu oleh TNI.
5. Melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan (konflik SARA) dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban;

DAFTAR PUSTAKA

1. Laporan Rapim POLRI. Identifikasi Potensi Konflik Yang Bersumber Dari SARA, Industri, Economy Gap, Masalah Ketenagakerjaan dan Dampak Industri Perkebunan Serta Penanggulangan Secara Efektif. Jakarta. 30 Januari 2013.
2. Laporan Paparan Kapolda Kalimantan Timur pada Rapat Konsolidasi Kominda Diperluas se Kalimantan Timur. 21 Februari 2013.
3. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Potensi Konflik di Daerah Kalimantan Timur, Disampaikan Dalam Rapat Kerja Teknis. Samarinda, 9 Oktober 2012.
4. Ahmad Jubaidi.2010. Makalah. Mengelola Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Modal Pembangunan Daerah. Makalah disampaikan dalam rangka kegiatan penguatan akses Kearifan Lokal Daerah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Tanggal 4 Agustus 2010.
5. Ahmad Jubaidi. 2011. Peranan FKPMKT Dalam Proses Asimilasi & Rekonsiliasi Sosial Makalah disajikan : Dalam Rangka Kegiatan Penguatan Akses Kearifan Lokal Dinas Sosial Prov Kaltim Samarinda, 20 April 2011.
6. Ahmad Jubaidi. 2012. Resolusi Konflik Bencana Sosial di Kalimantan Timur. Makalah Disampaikan Untuk Kegiatan Rakor Kaltim Peduli Bencana 2012 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 11 September 2013.
7. Ahmad Jubaidi. 2013. Makalah. Perubahan Sosial dan Konflik Sosial. Makalah Disampaikan Untuk Kegiatan Pemantapan dan Penguatan Akses Kearifan Lokal Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Sabtu, 21 September 2013.

